

DAMPAK *ARMS RACE* ANTARA PAKISTAN DAN INDIA PADA TAHUN 2017 - 2019

Oleh:

RIZKI DWI AMALIA^{1*}

NIM E1111161037

Saherimiko², Ori Fahriansyah²

*Email : rzkidwiamalia@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Tulisan yang berjudul “Dampak *Arms Race* Antara Pakistan dan India Pada Tahun 2017-2019” ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif yang membahas mengenai akibat dari perlombaan senjata antara dua negara, yaitu Pakistan dan India terhadap stabilitas keamanan kedua negara pada tahun 2017-2019. *Arms race* atau perlombaan senjata adalah sebuah kondisi ketika dua negara atau lebih berkompetisi untuk saling meningkatkan kapabilitas militer. Pakistan dan India merupakan dua negara yang saling berlomba untuk memperkuat kekuatan negara sejak diberikan kemerdekaan dari Bangsa Inggris pada tahun 1947. Peristiwa ini terjadi pada situasi internasional anarki, dimana tidak adanya kekuasaan tertinggi di atas negara yang menyebabkan adanya rasa terancam jika negara lain lebih kuat sehingga dapat menyerang negara yang lebih lemah. Peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka berupa buku, berita, artikel, dan penelitian terdahulu dalam mencari dan menemukan informasi dan data-data yang terkait. Penelitian ini menggunakan teori neorealisme sebagai anggapan dasar dari peristiwa yang diteliti kemudian menggunakan konsep *Balance of Power* dan *Arms Race* sebagai penjelasan pendukung. Hasil yang ditemukan peneliti adalah stabilitas keamanan Pakistan dan India pada tahun 2017-2019 relatif stabil dikarenakan adanya kesadaran masing-masing pemerintah terhadap kekuatan negara lawan dengan adanya pertukaran data-data kepemilikan senjata nuklir melalui perjanjian bilateral, sehingga dapat menekan tindakan yang akan menyebabkan eskalasi konflik antar keduanya. Peran pemerintah sebagai aktor negara sangat penting dalam pengambilan keputusan sehingga perlu adanya pertimbangan yang matang dari masing-masing pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: Pakistan, India, Neorealisme, *Arms Race*, *Balance of Power*

IMPACT OF ARMS RACE BETWEEN PAKISTAN AND INDIA IN 2017-2019

Written by:

RIZKI DWI AMALIA^{1*}

NIM E1111161037

Saherimiko², Ori Fahriansyah²

*Email : rzkidwiamalia@student.untan.ac.id

1. Student of International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturer of International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura.

Abstract

The article entitled "Impact of Arms Race between Pakistan and India in 2017-2019" is a qualitative research with a descriptive method that discusses the impact of the arms race between two countries, namely Pakistan and India on the security stability of the two countries in 2017-2019. Arms race is a condition when two or more countries compete to increase each other's military capabilities. Pakistan and India are two countries that have competed with each other to strengthen the power of the country since being given independence from the British in 1947. This event occurred in an anarchic international situation, where there was no supreme power over the country which caused a sense of being threatened if another country was stronger so they can attack weaker countries. Researchers used library research methods in the form of books, news, articles, and previous research in seeking and finding related information and data. This study used the theory of neorealism as the basic assumption of the events studied, then used the concepts of Balance of Power and Arms Race as supporting explanations. The researcher found that the security stability of Pakistan and India in 2017-2019 was relatively stable due to the awareness of each government towards the strength of the opposing country by exchanging data on nuclear weapons ownership through bilateral agreements, so as to suppress actions that would lead to an escalation of conflict between the two. The role of the government as a state actor was very important in decision making so that careful consideration from each government was needed in making decisions.

Keywords: Pakistan, India, Neorealism, Arms Race, Balance of Power



A. Pendahuluan

Pakistan dan India merupakan dua negara yang berbatasan wilayah. Perbatasan wilayah ini kemudian memunculkan konflik perebutan wilayah perbatasan yang terjadi semenjak diberikannya kemerdekaan oleh Bangsa Inggris pada tahun 1947. Konflik yang terjadi diantara kedua negara ini beberapa kali menyebabkan perang berkelanjutan hingga tahun 1999. Kedua negara yang berkonflik ini kemudian saling berlomba untuk memperkuat kekuatan negara sebagai tindakan defensif agar tidak diserang oleh negara yang lebih kuat. Tindakan ini didasari pada anggapan dasar neorealisme yang terjadi pada situasi internasional yang anarki, yaitu tidak adanya kekuasaan tertinggi di atas negara sehingga suatu negara akan selalu merasa tidak aman dan harus selalu bersiap jika ada negara lain menyerang. Pada sistem internasional anarki, *balancing power* adalah salah satu cara negara agar dapat mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negaranya. Pakistan dan India melakukan *balancing power* memfokuskan pada *hard power* negara dengan cara memperkuat kekuatan militer dan kepemilikan senjata nuklir sehingga terjadi *arms race* antara keduanya.

Stabilitas keamanan Pakistan dan India pada tahun 2017-2019 beberapa kali mengalami peningkatan ketegangan antar keduanya. Meskipun terdapat beberapa konflik yang terjadi seperti pelanggaran *Line of Control* oleh kedua negara dan konflik Pulwama, namun pemerintah kedua negara dapat meredam dan menahan diri agar tidak terjadinya eskalasi konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Pakistan dan India juga memiliki beberapa perjanjian baik bilateral maupun multilateral mengenai senjata nuklir yang dimiliki oleh keduanya. Perjanjian-perjanjian menyangkut mengenai pengendalian senjata nuklir, agenda tahunan untuk pertukaran informasi terperinci mengenai lokasi semua fasilitas terkait nuklir negara, dan prinsip tidak

akan melakukan penggunaan pertama (*no first use*) akan nuklir yang dimiliki. Kedua negara yang saling melakukan perlombaan senjata untuk memperkuat negaranya merupakan tindakan defensif yang kemudian masing-masing akan saling mengurungkan niat untuk menyerang ataupun berperang karena sadar akan kapabilitas negara lawan yang dapat menghancurkan dan hanya menimbulkan kekalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak *arms race* antara Pakistan dan India terhadap stabilitas keamanan kedua negara pada tahun 2017-2019?”. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode ini dipilih untuk dapat mengeksplorasi, menggambarkan, dan memahami makna serta arti yang berasal dari aktor negara, yaitu Pakistan dan India yang terjadi dalam masalah sosial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang didapatkan dari sumber buku bacaan hubungan internasional, jurnal nasional dan internasional mengenai konflik, artikel ataupun media yang memuat berita-berita internasional baik berupa fisik maupun digital yang memberikan informasi berhubungan dengan konflik Pakistan dan India.

B. Metode Penelitian

1. Teori Neorealisme

Neorealisme merupakan teori yang muncul karena adanya kritik terhadap asumsi dasar realisme yang menyatakan bahwa sifat dasar manusia sebagai penjelas terhadap berbagai perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional (Mearsheimer, 2013: 78). Dalam pandangan neorealisme, sifat dasar manusia yang konfliktual tidak mempengaruhi perilaku negara dalam politik internasional. Neorealisme lebih mempercayai bahwa struktur anarki

internasional adalah hal yang dapat mempengaruhi negara dalam bertindak agresif (Waltz, 1979).

Aliran neorealisme atau yang biasa disebut sebagai struktural realisme menekankan kepada adanya struktur dalam melihat fenomena hubungan internasional. Pemikir kaum neorealisme yang terkenal adalah Kenneth Waltz mengambil beberapa elemen realisme klasik dan neoklasik sebagai titik awal (Jackson & Sorensen, 1999, p. 110). Waltz (1979) menyatakan bahwa bentuk dasar pada hubungan internasional merupakan struktur anarki yang ada diantara negara-negara. Struktur menjadi aspek yang signifikan dalam pembentukan pola dari tindakan sebuah negara.

Pada pandangan dasar neorealisme mempercayai akan struktur internasional yang anarki, dimana tidak adanya otoritas atau kekuasaan tertinggi yang dapat mengatur relasi antar negara. Dalam kondisi anarki, potensi tindakan negara untuk menyerang ataupun diserang oleh negara lain tidak dapat diprediksi. Kondisi tersebut yang menyebabkan setiap negara berusaha untuk mencapai kapabilitas keamanan (security) dan kekuatan (power) semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa tidak aman dan ancaman serangan dari negara lain. Tindakan negara dapat dikatakan sebuah hasil dari kompetisi yang terjadi antar negara (Elman, 2007, p. 13).

Neorealisme adalah teori dalam ilmu hubungan internasional yang pertama kali dikenalkan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979. Waltz dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics*. Pada tahun 1986 Waltz kembali menulis artikel dan membawa lima misi yang dituliskannya ke dalam tulisannya yang berjudul *Reflections on Theory of International Politics*.

1. Mengembangkan teori politik internasional yang lebih ilmiah daripada yang pernah dikembangkan oleh realisme klasik.

2. Membuat para peneliti Hubungan Internasional mampu membedakan antara

“unit” (peringkat internasional) dan ‘Struktur/Sistem’ (peringkat regional) dan membangun konektivitas antara keduanya.

3. Menunjukkan bahwa pola pikir realisme klasik yang berkecenderungan “inside-out” (unit mempengaruhi system) tidak memadai, sehingga diperlukan pemikiran “outside-in” (sistem mempengaruhi unit) dalam karya-karya Hubungan Internasional.

4. Menunjukkan pentingnya menganalisis bagaimana perilaku negara berbeda satu sama lain dalam merespons perubahan-perubahan dalam struktur lingkungan regional atau internasional melalui analisis “outside-in”

5. Mengusulkan bahwa teori harus selalu diuji kebenarannya (Hadiwinata, 2017, p. 111)

Waltz (1979) menyebutkan bahwa dalam politik internasional yang anarki, setiap aktor negara harus memperjuangkan sendiri keberadaannya dengan membangun kekuatan militer yang kuat sehingga negara lain akan mempertimbangkan niat ingin menyerang negara tersebut menimbang besarnya kemungkinan kalah dalam pertahanan militer. Jika negara tidak memperjuangkan kekuatan negaranya, maka dalam sistem internasional anarki akan berakibat fatal terhadap eksistensi negaranya seperti kekalahan dalam peperangan atau bahkan dapat dikuasai oleh negara lain (Hadiwinata, 2017, p. 112)

Neorealisme melihat bahwa tindakan dan keputusan yang dilakukan aktor negara merupakan kebutuhan akan keamanan fisik, oleh karena itu neorealisme cenderung berhubungan dengan isu-isu keamanan nasional dan berkonsentrasi pada kapabilitas. Pandangan ini juga menganggap bahwa kerjasama internasional sebenarnya sulit untuk dicapai dan pesimis bahwa institusi internasional dapat mengurangi anarki internasional (Dugis, 2016).

Di dalam perspektif neorealisme, struktur dalam hubungan internasional adalah hal yang terpenting karena

struktural yang akan menentukan perilaku negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Baik realisme maupun neorealisme sama-sama memandang dunia apa adanya bukan memandang dunia yang seharusnya. Isu utama yang dibahas dalam perspektif ini ialah masalah military security, survival serta berbagai macam isu yang termasuk ke dalam isu-isu high politics. Neorealisme memandang negara sebagai aktor utama yang rasional. Negara juga diharuskan untuk memaksimalkan kekuatannya serta negara dalam hubungan internasional hidup dalam sistem anarki, dimana tidak mengakui adanya supra-state (Wardhani, 2014). Dalam kaitannya dengan stabilitas internasional, neorealisme percaya bahwa stabilitas internasional dapat tercapai dengan konsep *balance of power*, konsep yang menyamaratakan kekuatan antar polar-polar penting kekuatan dunia agar tidak terjadi hegemoni kekuatan (Hadiwinata, 2017, p. 113).

Menurut Waltz walaupun setiap negara memiliki perbedaan, namun selalu ada kesamaan yang menjadi dasar negara dalam bertindak. Secara logika, bila realisme klasik memfokuskan diri pada perilaku manusia atau individu sebagai penjelas dari tindakan negara, maka seharusnya kebijakan yang dilakukan negara dapat berbeda pula berdasarkan logika individunya. Waltz tidak setuju akan pandangan tersebut dan mencoba menunjukkan bahwa ada aspek penjelas yang sama dari tindakan negara, yaitu struktur sistem internasional.

Dalam konteks ini, Pakistan dan India telah bermusuhan sejak diberikannya kebebasan oleh Bangsa Inggris pada tahun 1947. Hal ini membuat kedua negara yang secara geografis bersebelahan itu memunculkan banyak konflik, salah satunya adanya perlombaan senjata nuklir antar keduanya. Seperti yang telah dituliskan oleh Waltz pada artikel "*Reflections on Theory of International Relations*" mengenai adanya pola pikir *outside-in* dimana struktur dapat

mempengaruhi unit, dapat dilihat bahwa Pakistan dan India bertindak untuk membentuk keamanan kawasan demi meredam konflik dalam sistem anarki. Neorealisme merupakan teori yang tepat untuk menganalisis peristiwa ini karena pada teori ini sifat realis suatu negara tidak hanya berujung pada konflik, namun jika terdapat kondisi setara atau equilibrium maka negara-negara akan terikat pada negara lain yang akan meredam konflik yang terjadi.

2. Konsep Arms Race

Arms Race atau perlombaan senjata merupakan sebuah kondisi ketika dua negara atau lebih berkompetisi untuk meningkatkan kapabilitas militer yang kuat. Negara-negara tersebut akan bersaing untuk memproduksi dan membeli senjata, memperkuat pertahanan militer, memperbanyak kekuatan teknologi militer, menambahkan anggaran pengeluaran militer, dll. Menurut seorang ahli konflik internasional Theresa Clair Smith, mendefinisikan *arms race* sebagai keikutsertaan dua negara atau lebih dalam peningkatan kualitas dan kuantitas materi perang dan orang-orang yang terlibat terlihat lebih kompetitif atau interaktif.

Arms race merupakan sebuah pola dari hasil kemampuan militer secara kompetitif antara dua atau lebih negara. Istilah ini digunakan pada pembangunan militer atau peningkatan pengeluaran di bidang militer oleh suatu negara. Perilaku kompetitif dari peningkatan pengeluaran militer dan kapabilitas militer ini mencerminkan hubungan yang kurang baik antar negara yang terlibat (Freeman, 2013).

Perlombaan senjata mungkin melibatkan perolehan kemampuan militer secara kompetitif yang lebih umum. Hal ini dapat diukur dengan pengeluaran militer. Perlombaan senjata yang lebih umum sering kali terjadi di antara negara-negara yang terlibat dalam persaingan abadi yang dapat dilihat dari peningkatan pengeluaran militer masing-masing seperti

Pakistan dan India. Peristiwa yang terjadi antara Pakistan dan India ini terjadi karena adanya rasa tidak ingin kalah dari negara lawan (Webel, 2002, p. 247).

Pakistan dan India telah bersaing baik dalam senjata, tentara, aset angkatan laut, bahkan dalam hal peluncuran nuklir. Masing-masing saling mencoba untuk menunjukkan bahwa merekalah negara yang kuat dengan mengeluarkan sejumlah pembelanjaan negara dalam bidang militer yang tidak sedikit nominalnya. Tak hanya sampai peperangan fisik yang dilakukan oleh pasukan militer Pakistan dan India, percobaan peluncuran nuklir pun sering kali terjadi diantara keduanya. Masing-masing negara saling berusaha untuk menunjukkan kekuatan nuklir yang dimiliki.

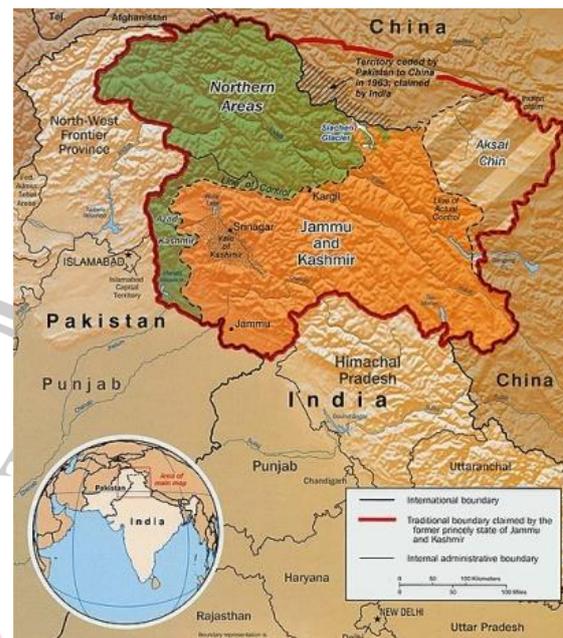
Arms race yang terjadi diantara Pakistan dan India sendiri dapat menekan untuk terjadinya perang terbuka dikemudian hari. Karena masing-masing negara merasa terancam dengan kekuatan negara lain (Security Dilemma) dan berusaha menguatkan kekuatan dari negara sendiri agar tidak ada negara yang memiliki kekuatan dominan.

C. Pembahasan

1. *Line of Control* dan Wilayah Kashmir

Line of Control (LoC) merupakan batas garis kontrol militer antara warga India dan warga Pakistan yang terkontrol dari batas wilayah bagian Jammu dan Kashmir. Garis ini bukan batas yang diakui secara hukum internasional, namun berfungsi sebagai perbatasan *de facto*. Pada mulanya diakui sebagai garis gencatan senjata, namun kemudian didesain ulang sebagai *Line of Control* setelah *Simla Agreement* yang ditandatangani pada 3 Juli 1972.

Gambar 1: Peta Perbatasan Kashmir



Sumber: Library of Congress; Map Kashmir region
<https://www.loc.gov/resource/g7653j.ct001059/> (diakses pada tanggal 9 Desember 2020)

Setelah perang di Kashmir pada tahun 1965 dan perang Indo-Pakistani pada tahun 1971 yang menyebabkan negara Bangladesh merdeka, terjadi sedikit perubahan yang terjadi pada garis gencatan senjata yang asli. Pada *Simla Agreement* tahun 1973, kedua negara setuju untuk mengubah garis gencatan senjata menjadi *Line of Control* dan menjadikannya perbatasan *de facto* yang tidak boleh dilanggar oleh tindakan bersenjata oleh kedua negara. Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton mengatakan bahwa *Line of Control* ini merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia (BBC, 2000) *Line of Control* membagi Kashmir menjadi dua bagian dan menutup rute Lembah Jehlum yang merupakan pintu keluar masuknya Lembah Kashmir. Pembagian wilayah ini tetap ada dan memisahkan banyak desa dan anggota keluarga satu sama lain pada wilayah itu (Puri, 2010, p. 75).

Pada tahun 2018 terjadi kembali bentrokan sengit di Kashmir. Wilayah Kashmir yang merupakan wilayah konflik

ini kembali merenggut korban jiwa. Empat orang warga sipil tewas ketika polisi menembaki para demonstran yang melemparkan batu ke warga sekitar. Otoritas wilayah Kashmir melaporkan adanya korban jiwa dan ini merupakan insiden terburuk di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir. Selain warga sipil Kashmir yang menjadi korban, tiga orang tentara India dan 13 orang yang diduga anggota kelompok milisi ikut tewas dalam konflik Kashmir. (BBC News Indonesia, 2018).

Pada hari rabu, 27 Februari 2019 Pakistan menembak jatuh dua pesawat jet India. Kejadian ini terjadi sehari setelah pesawat tempur India menyerang wilayah Pakistan di Kashmir. Peristiwa ini merupakan salah satu akibat dari peristiwa bom bunuh diri oleh militan Pakistan di Kashmir wilayah kuasa India yang menewaskan sedikitnya 40 polisi militer India (Mangkuto, 2019). Beberapa pesawat angkatan udara India masuk ke Kashmir wilayah Pakistan setelah pihak dari Pakistan melakukan serangan udara di Kashmir wilayah India. Mayor Jendral Asis Ghafoor menyatakan bahwa Pakistan telah menembak jatuh dua pesawat India dalam wilayah udara Pakistan. Salah satu pesawat jatuh di Kashmir wilayah India dan yang lainnya jatuh di Kashmir wilayah Pakistan dan pilot dari pesawat tersebut ditahan oleh pihak Pakistan (Mangkuto, 2019).

India kemudian menuntut pihak Pakistan untuk membebaskan pilot pesawat tempurnya yang ditembak jatuh pada peristiwa konflik yang terjadi di perbatasan. Tersebar rekaman video yang dirilis oleh Kementrian Informasi Pakistan menampilkan pilot India yang ditahan oleh pihak Pakistan dalam keadaan mata tertutup dan penuh dengan luka-luka. India menyebutkan bahwa video yang disebar oleh pihak Pakistan tersebut sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh pihak Pakistan (BBC News Indonesia, 2019).

Setelah menyampaikan pendapatnya mengenai penahanan pilot pesawat tempur warga India, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan juga berpendapat bahwa eskalasi konflik yang terjadi antara Pakistan dan India harus ditangani dengan tepat. Menurutnya kedua negara tidak boleh salah perhitungan mengenai konflik yang terjadi karena persenjataan dan nuklir yang dimiliki oleh masing-masing negara dapat saling membahayakan satu sama lain. Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj menekankan negaranya akan bertindak dengan tanggung jawab dan mengekang diri dari konflik yang terjadi. Ia mengatakan India tidak ingin eskalasi konflik yang terjadi menjadi lebih besar. Tantangan bagi India dan Pakistan adalah meredakan eskalasi yang terjadi sebelum eskalasi tersebut menjadi lebih lanjut dan lepas kendali. Hal ini dikhawatirkan karena kekuatan nuklir yang dimiliki oleh kedua negara yang jika diluncurkan karena eskalasi konflik yang tidak mereda dapat menyebabkan banyak kerugian dan korban jiwa (BBC News Indonesia, 2019).

Sama seperti pernyataan dari Perdana Menteri Pakistan, pada konflik ini sebenarnya kedua negara sadar akan kekuatan masing-masing negara dan negara lawan, yaitu Pakistan dan India. Kedua negara ini sama-sama memiliki data persenjataan dan nuklir dari masing-masing negara seperti yang telah ditetapkan melalui *Non-Nuclear Aggression Agreement*. Hal ini juga merupakan contoh dari teori neo-realisme, yaitu dimana *arms race* sebenarnya dapat menciptakan titik damai atau tidak terjadinya konflik terbuka negara karena masing-masing negara memperkuat persenjataan semata-mata sebagai alat perlindungan agar negara lain enggan menyerang karena pertimbangan kerusakan yang dapat terjadi jika terjadinya konflik besar seperti perang terbuka.

2. Konflik Pulwama

Pada tanggal 14 Februari 2019, terjadi penyerangan menggunakan bom bunuh diri yang menyerang sebuah kendaraan yang membawa personel keamanan India di Jalan Raya Nasional Srinagar Jammu. Seseorang melakukan bom bunuh diri dengan mengendarai mobil di Lethpora di Distrik Pulwama, Jammu dan Kashmir. Serangan ini menargetkan pada 40 personel Pasukan Polisi Cadangan Pusat (CRPF) dan menyerang kelompok militan islamis yang berbasis di Pakistan. Jaish-e-Mohammed menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Penyerang adalah Adil Ahmad Dar, yaitu seorang warga lokal dari Kashmir yang dikuasai India dan merupakan anggota Jaish-e-Mohammed (Dawn, 2019).

Gambar 2: Peta Line of Control



Sumber: Pulwama attack: India will 'completely isolate' Pakistan
[bbc.com/news/world-asia-india-47249133](https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47249133)
diakses pada tanggal 14 Desember 2020

Sebuah bus yang membawa personel keamanan India ditabrak oleh mobil pengangkut bahan peledak pada pukul 15.15 IST di Lethpora. Kejadian ini menyebabkan ledakan yang menewaskan 40 personel CRPF dari Batalion 76 dan melukai banyak personel tentara lainnya. (Chahabra, 2019). Kelompok militan yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammed merilis video penyerangan Adil Ahmad Dar. Ia merupakan anggota dari Jaish-e-

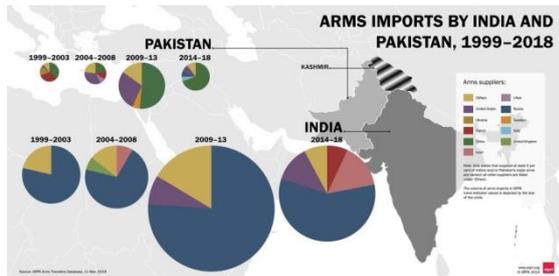
Mohammed yang berusia 22 tahun dan telah bergabung menjadi anggota kelompok tersebut setahun sebelumnya (PTI, 2019).

Pakistan menyangkal keterlibatannya meskipun pemimpin Jaish-e-Mohammed, Masood Azhar diketahui beroperasi di negara tersebut (BBC, 2019). Jaish-e-Mohammed sendiri merupakan sebuah kelompok teroris jihadis yang berbasis di Pakistan dan aktif di wilayah Kashmir. Tujuan utama dari kelompok ini adalah untuk memisahkan Kashmir dari India dan menggabungkannya ke dalam Pakistan. Sejak didirikan pada tahun 2000, unit terror tersebut telah melakukan beberapa penyerangan di negara bagian Jammu dan Kashmir. Jaish-e-Mohammed memproyeksikan Kashmir sebagai pintu gerbang muslim India yang menginginkan pembebasan. Setelah membebaskan Kashmir, kelompok ini bercita-cita untuk membawa jihad yang dilakukannya ke daerah lain di India dengan tujuan untuk mengusir umat Hindu dan non-Muslim lainnya dari anak benua India (Popovic, 2015, p. 925).

3. Pengembangan Pertahanan Negara dan Kebijakan Program Nuklir Pakistan dan India

Pada umumnya senjata nuklir dirancang untuk mencegah serangan nuklir atau serangan konvensional dari negara lain. Pada kondisi tertentu, situasi ini tidak terbukti untuk menghalangi konflik intensitas rendah seperti pertempuran perbatasan serta konflik dengan aktor non-negara. Kesimpulan ini memiliki relevansi khusus dalam kasus yang terjadi di Asia Selatan, yaitu Pakistan dan India (Frey, 2006, p. 12).

Gambar 3: Negara Importir Senjata Oleh Pakistan dan India Tahun 1999-2018



Sumber: SIPRI Fact Sheets March 2019, TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2018

Banyak orang India yang berharap bahwa akuisisi persenjataan nuklir dapat menghalangi aktivitas militer kecil Pakistan di Kashmir atau sebagai peredam terhadap aktivitas pemberontak yang ada di Kashmir. (Frey, 2006, p. 12). Pemahaman akan dua negara yang saling menggunakan nuklir sebagai pertahanan dapat mencegah terjadinya perang skala besar antara kedua negara. Kekuatan yang lebih rendah dapat dimanfaatkan terhadap stabilitas pencegahan jika meluncurkan serangan militer terbatas dan berskala kecil pada tingkat regional tanpa adanya risiko kekalahan yang besar. Disampaikan oleh Michael Krepon dan Chris Gagné (2001) dilema situasi ini disebut sebagai “paradoks stabilitas-ketidakstabilan”. Dilema ini telah terjadi selama Perang Kargil yang terjadi pada tahun 1999 (Frey, 2006, p. 13).

Pada lingkungan strategis Asia Selatan, terdapat dua penyebab struktural pembangunan nuklir di India. Pertama, hubungan India yang terasingi dengan China yang bersenjata nuklir. Kedua, hubungan yang tidak harmonis dengan Pakistan. Pada persoalan Indo-Pakistan, diperlukan penjas terhadap *arms race* konvensional dan perolehan senjata nuklir oleh kedua negara (Frey, 2006, p. 15)

Sistem pertahanan merupakan sektor yang memiliki pengeluaran utama dan paling besar dalam ekonomi India. Tindakan India ini dapat dipahami karena secara letak geografis India yang

berbatasan dengan tujuh negara tetangga dan memiliki luas area 15.000km. Keadaan geografis ini merupakan tantangan besar bagi pertahanan India (India Government, 2020).

Gambar 4: frekuensi Pembelian Peralatan Pertahanan India pada 1998-2018



Sumber :Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Pada grafik tersebut menunjukan data frekuensi negara India dalam menambah peralatan pertahanan negara dari tahun 1998-2018 dengan frekuensi yang cukup tinggi meskipun adanya naik turun ekonomi yang terjadi. Data tersebut dapat disebabkan karena adanya kecenderungan India untuk selalu meningkatkan kekuatan pertahanan. Pengadaan peralatan-peralatan ini akan tetap terjadi seiring dengan adanya security dilemma dan upaya balancing power yang terjadi di kawasan.

Berdasarkan data yang diambil dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dari tahun 1998-2018, India telah membeli berbagai macam jenis alat-alat pertahanan termasuk dalam sektor darat, laut, dan udara dari 23 negara, yaitu Australia, Denmark, Perancis, Jerman, Israel, Italia, Belanda, Polandia, Russia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Inggris, Amerika, Brazil, Kanada, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Norwegia, Slovakia, Swiss, Ukraina dan Uzbekistan. Kemudian dari total 357 transaksi, 285 transaksi merupakan transaksi baru sedangkan 74 transaksi lainnya merupakan pemesanan berulang. Transaksi berulang ini dilakukan karena adanya keterbatasan pengadaan dalam satu transaksi sehingga

diperlukannya transaksi berulang untuk mendapatkan unit yang utuh. Contohnya, India membeli 330 unit helikopter SA-316b Allouette-3 pada tahun 1962, namun India dapat menerima seluruh 330 unit ini pada tahun 2003. Dengan kata lainnya, hal ini terjadi karena unit-unit yang dibeli hanya dapat dikirimkan secara berangsur. Russia merupakan negara penjual tertinggi yang bertransaksi dengan India. India membeli persenjataan dari Russia sebanyak 118 kali. Berikutnya adalah negara Israel dengan total 77 kali transaksi dan kemudian Amerika Serikat sebanyak 36 transaksi.

Sebuah laporan dari BBC menunjukkan bahwa Russia telah menjadi pemasok utama untuk India sejak lama. Pembelian senjata India dari Russia mencapai puncaknya pada tahun 2012 dengan total biaya 10 miliar dollar AS. India juga termasuk dalam salah satu negara dengan nilai impor senjata tertinggi di dunia, dimana Russia sendiri memasok sampai dengan 70% kebutuhan senjata India (BBC Indonesia, 2012). Pada tahun 2016 sebuah kolaborasi didiskusikan oleh kedua negara ini mengenai program “*Make in India*”, yaitu program yang dilakukan untuk memodernisasikan industri pertahanan dengan mengembangkan industri pertahanan India yang diawasi langsung oleh Russia pada agenda “*Defexpo India 2016 International Land and Naval System Exhibition*”. Senjata yang di ekspor dari Russia dan dikembangkan oleh India mencakup T-90MS Tagil yang ditingkatkan dari MBT terbaik Russia, tank perang T-90MS, dan kendaraan tempur BMP-3.

Russia dan India telah mendirikan hubungan strategis yang menguntungkan satu dengan yang lain, terutama dalam bidang pertahanan dan kerjasama militer sejak tahun 1960an. Kedekatan antara kedua negara ini menimbulkan protes dari Amerika Serikat. India telah menerima peringatan oleh Amerika Serikat mengenai pembelian senjata dari Russia. Amerika Serikat dapat menjatuhkan sanksi pada

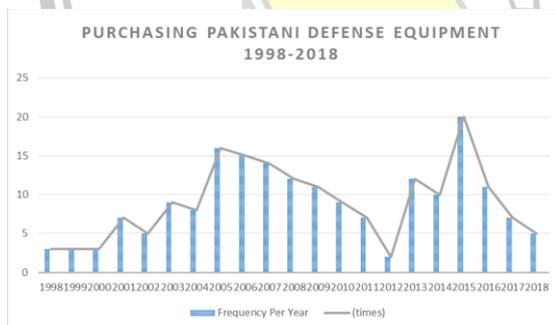
negara pihak ketiga jika mereka melakukan transaksi dengan pertahanan Russia atau dalam sektor inteligensi (Islam Times, 2018). Peringatan ini diabaikan oleh India dan memicu kedekatan hubungan antara Amerika Serikat dan Pakistan. India sendiri lebih memilih untuk melakukan kerjasama dengan negara adidaya yang bermusuhan atau tidak melakukan kerjasama dengan Pakistan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kompetisi antara India dan Pakistan juga berdampak bagaimana kedua negara tersebut memilih aliansi.

Jajaran dari peralatan pertahanan yang dimiliki India secara terus menerus meningkat dengan hadirnya senjata nuklir yang dikembangkan oleh India bahkan sebelum kemerdekaan. India memulai percobaan nuklir pada Mei 1998 sebanyak lima kali di kawasan yang berdekatan dengan wilayah Pakistan. Serangkaian percobaan nuklir ini memprovokasi terjadinya Perang Kargil pada tahun 1999 (Jejak Tapak, 2016). Pada tahun 2006, India melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat saat kepemimpinan Bush dalam sektor pengembangan reaktor nuklir. Kerjasama ini akhirnya berakhir setelah Amerika Serikat beberapa kali menentang pemindahan teknologi senjata nuklir kepada India (DW, 2006). Pada tahun 2019 India menandatangani persetujuan untuk menyewa kapal selam bertenaga nuklir dari Russia untuk 10 tahun kedepan. Russia menjadi pemasok utama untuk senjata dan sistem pertahanan India pada masa perang dingin. Hal ini dilakukan India untuk menetralkan kekuatan lawannya, yaitu Pakistan. Serangkaian aksi yang dilakukan ini memancing reaksi yang sama oleh Pakistan. Situasi ini sama dengan pandangan Chari yang berargumentasi bahwa konflik militer antara Pakistan dan India yang mencapai ambang nuklir merupakan kepercayaan diantara pendukung bom India bahwa Pakistan merupakan negara lawan, pemimpin Pakistan tidak rasional dan tidak dapat dipercaya bahwa tidak akan

menggunakan senjata nuklir, oleh karena itu India harus dalam keadaan yang siap jika suatu saat diserang oleh negara tersebut.

Awal tahun 2017 India mencatat rekor dengan peluncuran 150 satelit dalam sekali peluncuran. Rekor ini menyalip rekor Rusia yang pada tahun 2014 yang meluncurkan 37 satelit dalam sekali peluncuran. Satelit-satelit ini diluncurkan dari pusat antariksa India di kota Sriharikota, India bagian timur (BBC News Indonesia, 2017). Pemerintah India telah meningkatkan anggaran untuk menjalankan program luar angkasa pada tahun 2017 dan beberapa rencana untuk kedepannya. Satelit kartografi India yang mampu mengambil gambar dengan resolusi tinggi. Satelit tersebut dirancang untuk memantau wilayah negara yang berseteru dengan India seperti Pakistan dan Tiongkok (BBC News Indonesia, 2017)

Gambar 5: Frekuensi Pembelian Peralatan Pertahanan Pakistan Pada Tahun 1998-2018



Sumber : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Pakistan merespon sikap India dengan cara melakukan pengembangan terhadap persenjataan. Berdasarkan data yang ada, meskipun Pakistan memiliki perbandingan frekuensi yang lebih rendah dari India dalam pembelian peralatan pertahanan, Pakistan konsisten terhadap pembangunannya. Berdasarkan data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Pakistan memulai 214 pembelian berbagai macam senjata konvensional dimana 189 merupakan

transaksi baru dan 25 merupakan pembelian berulang dari tahun 1998-2018 dengan 23 negara berbeda, yaitu Tiongkok, Perancis, Italia, Swedia, Thailand, Turki, Amerika Serikat, Belarus, Brazilia, Kanada, Jerman, Indonesia, Yordania, Libanon, Libya, Malta, Belanda, Russia, Spanyol, Swiss, Uni Emirat Arab, Ukraina dan Inggris. Tiongkok merupakan aliansi utama Pakistan. Pakistan telah melakukan 63 kali pembelian senjata dengan Tiongkok, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat sebanyak 60 kali transaksi dan kemudian Perancis dengan 15 kali transaksi.

Pakistan telah melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat sejak tahun 1960an. Pakistan juga melakukan kerjasama dengan Tiongkok, Russia, dan beberapa negara Eropa Timur. Keputusan Pakistan untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok menimbulkan rasa tidak senang dari Amerika Serikat, dimana pada tahun 1965 ketika perang India-Pakistan, Amerika Serikat menahan bantuan militernya kepada Pakistan, dan pada tahun 1990an Amerika Serikat kembali menahan pengembangan senjata nuklir Pakistan. Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa Tiongkok merencanakan untuk membangun markas tepi pantai angkatan laut kedua yang berdekatan dengan pelabuhan strategis Pakistan. Kedekatan kedua negara ini kemudian disebut dengan "iron brother" oleh ketua Chinese Central Military Commission Fan Changlong. Usaha meningkatkan kerjasama ini diinterpretasikan sebagai usaha perimbangan untuk menetralkan kekuatan India dan Amerika Serikat (Wong, 2018). Kerjasama militer ini termasuk kedalam desain dari jet tempur JF-17 oleh Tiongkok dan digunakan oleh Pakistan, penjualan dari kapal selam rahasia dari Tiongkok kepada Pakistan bernilai 5 miliar dolar Amerika, pelatihan gabungan angkatan laut, pemberantasan terorisme, dan negosiasi mengenai pertahanan (Wong, 2018).

Sumber dan kapabilitas ekonomi Pakistan yang cenderung lebih rendah dari India membuat Pakistan mencari lebih banyak aliansi. Walaupun kerja sama militer tidak berjalan dengan lancar antara Pakistan dan Amerika Serikat, namun Amerika Serikat tetap menjadi pemasok utama senjata-senjata Pakistan. Pakistan yang melihat kerjasamanya dengan Amerika Serikat semakin memburuk kemudian memilih untuk memperkuat kerjasamanya dengan Tiongkok. Oleh karena itu, Pakistan dan India tidak dapat dipisahkan dari siklus security dilemma dengan mengambil tindakan kerjasama, *arms race*, dan peningkatan sistem pertahanan negara.

India telah diuntungkan dalam formasi militer, baik dalam jumlah pasukan tentara maupun dalam jumlah senjata. Untuk menanggulangi ini, Pakistan menggunakan kapabilitas nuklir yang di klaim dapat lebih kuat dari pada nuklir yang dimiliki oleh India. Berdasarkan data oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) pada Juni 2018, Pakistan menyatakan akan memiliki 140-150 senjata nuklir, ketika India hanya memiliki 130-140 senjata nuklir. Pakistan secara mandiri mengembangkan nuklir seperti Shaheen-III. Nuklir tersebut merupakan misil balistik dengan jarak rendah yang dapat membawa sebuah bom nuklir. Misil ini diklaim oleh Pakistan akan mencegah India untuk melancarkan serangan mendadak. Militer Pakistan juga mengumumkan bahwa misil ini dapat mematikan sistem senjata apapun. Klaim ini diperkuat dengan opini para ahli yang mengatakan bahwa dengan meningkatkan pergerakan roket dari jarak 60 kilometer menjadi 70 kilometer (VOA, 2019). Sistem senjata ini dapat di meluncurkan beberapa misil dalam sekali peluncuran, oleh sebab itu Pakistan dapat menyerang beberapa target pada waktu yang bersamaan. Pakistan juga memiliki kelebihan dalam sumber tenaga nuklir yang berlimpah dinamakan uranium, sedangkan India memiliki sumber uranium

yang lebih terbatas.

Pengembangan program nuklir tidak dapat dilakukan tanpa adanya aturan-aturan yang berlaku di dunia internasional. Pakistan dan India yang memiliki potensi senjata nuklir telah melakukan beberapa perjanjian terkait pengembangan nuklir, baik perjanjian bilateral maupun multilateral dengan beberapa negara bersenjata nuklir. Antara lain:

a) Non-Nuclear Aggression Agreement

Non-Nuclear Aggression Agreement adalah perjanjian bilateral antara Pakistan dan India terhadap pengendalian senjata nuklir antara keduanya. Perjanjian ini mencakup mengenai perjanjian pengurangan senjata nuklir dan menyetujui untuk tidak menyerang atau membantu kekuatan asing untuk menyerang di masing-masing instalasi nuklir dan fasilitas negara. Perjanjian ini pertama kali dirancang oleh Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto dan Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi pada tanggal 21 Desember 1988 dan mulai berlaku pada Januari 1991 (Nuclear Threat Initiative, 2013) dan telah diratifikasi oleh masing-masing pihak.

Berikut adalah naskah dari Non-Nuclear Aggression Agreement:

"The Government of the Islamic Republic of Pakistan the Government of the Republic of India, herein after referred to as the Contracting Parties, reaffirming their commitment to durable peace and the development of friendly and harmonious bilateral relations; conscious of the role of confidence building measures in promoting such bilateral relations based on mutual trust and goodwill; have agreed as follows:

1.
 - i. *Each party shall refrain from undertaking, encouraging or participating in, directly or indirectly, any action aimed at causing the destruction of, or damage to, any nuclear installation or facility in the other country.*
 - ii. *The term "nuclear installation or*

facility" includes nuclear power and research reactors, fuel fabrication, uranium enrichment, iso-topes separation and reprocessing facilities as well as any other installations with fresh or irradiated nuclear fuel and materials in any form and establishments storing significant quantities of radio-active materials.

2. Each Contracting Party shall inform the other on 1st January of each calendar year of the latitude and longitude of its nuclear installations and facilities and whenever there is any change.

3. This Agreement is subject to ratification. It shall come into force with effect from the date on which the Instruments of Ratification are exchanged. Done at Islamabad on this Thirty-first day of December 1988, in two copies each in Urdu, Hindi and English, the English text being authentic in case of any difference or dispute of interpretation" (Work of Governments of India dan Pakistan, 2013).

Perjanjian ini melarang penandatungannya untuk melakukan serangan mendadak atau untuk membantu kekuatan asing untuk menyerang instalasi dan fasilitas nuklir masing-masing. Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menahan masing-masing pihak dari melakukan, mendorong, atau berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung akan tindakan yang bertujuan untuk menyebabkan kehancuran atau kerusakan pada masing-masing negara (Nuclear Threat Initiative, 2013).

Perjanjian tersebut menetapkan persyaratan pertukaran daftar tahunan yang merinci dan lokasi semua fasilitas terkait nuklir di setiap negara. Tindakan selanjutnya adalah perjanjian kedua belah pihak untuk tidak menyerang fasilitas yang terdaftar. Mulai Januari 1992, Pakistan dan India melakukan pertukaran daftar fasilitas militer dan sipil terkait dengan nuklir yang dimiliki masing-masing negara (Panda, 2020). Pada tahun 2020 Pakistan dan India masih tetap melanjutkan perjanjian ini dan

melakukan pertukaran daftar tahunan persenjataan nuklir pada awal tahun, tepatnya pada hari Rabu, 1 Januari 2020. Kementrian luar negeri menyatakan bahwa pertukaran ini dilakukan serentak melalui saluran diplomatic di New Delhi dan Islamabad (PTI, 2020). Perjanjian ini akan tetap dilakukan oleh kedua negara hingga waktu yang belum ditetapkan.

b) Deklarasi Lahore

Deklarasi Lahore adalah perjanjian bilateral antara Pakistan dan India. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 21 Februari 1999 yang dilakukan di Lahore, yaitu salah satu kota di Pakistan. Pada akhir pertemuan di Lahore, perjanjian ini diratifikasi oleh parlemen kedua negara pada tahun yang sama (United States Institute of Peace, 1999). Berikut adalah naskah dari perjanjian Lahore:

"The Lahore Declaration

The following is the text of the Lahore Declaration signed by the Prime Minister, Mr. A. B. Vajpayee, and the Pakistan Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in Lahore on Sunday:

The Prime Ministers of the Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan:

Sharing a vision of peace and stability between their countries, and of progress and prosperity for their peoples;

Convinced that durable peace and development of harmonious relations and friendly cooperation will serve the vital interests of the peoples of the two countries, enabling them to devote their energies for a better future;

Recognising that the nuclear dimension of the security environment of the two countries adds to their responsibility for avoidance of conflict between the two countries;

Committed to the principles and purposes of the Charter of the United Nations, and the universally accepted principles of peaceful coexistence;

Reiterating the determination of both

countries to implementing the Simla Agreement in letter and spirit; Committed to the objective of universal nuclear disarmament and nonproliferation; Convinced of the importance of mutually agreed confidence building measures for improving the security environment;

Recalling their agreement of 23rd September, 1998, that an environment of peace and security is in the supreme national interest of both sides and that the resolution of all outstanding issues, including Jammu and Kashmir, is essential for this purpose;

Have agreed that their respective Governments:

- shall intensify their efforts to resolve all issues, including the issue of Jammu and Kashmir.*
- shall refrain from intervention and interference in each other's internal affairs.*
- shall intensify their composite and integrated dialogue process for an early and positive outcome of the agreed bilateral agenda.*
- shall take immediate steps for reducing the risk of accidental or unauthorised use of nuclear weapons and discuss concepts and doctrines with a view to elaborating measures for confidence building in the nuclear and conventional fields, aimed at prevention of conflict.*
- reaffirm their commitment to the goals and objectives of SAARC and to concert their efforts towards the realisation of the SAARC vision for the year 2000 and beyond with a view to promoting the welfare of the peoples of South Asia and to improve their quality of life through accelerated economic growth, social progress and cultural development.*
- reaffirm their condemnation of terrorism in all its forms and manifestations and their determination to combat this menace.*
- shall promote and protect all human rights and fundamental freedoms.*

Signed at Lahore on the 21st day of February 1999.

Atal Behari Vajpayee - Prime Minister of the Republic of India

Muhammad Nawaz Sharif - Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan”

Beberapa poin dari Deklarasi Lahore adalah: (1) Mengakui bahwa nuklir dari sistem keamanan dari kedua negara merupakan tanggung jawab masing-masing negara untuk mencegah konflik di antara keduanya, (2) Melakukan asas dan tujuan dari perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan secara menyeluruh menerima asas dari perdamaian internasional, (3) Menyatakan ulang tekad kedua negara untuk mengimplementasikan Simla Agreement dalam tertulis maupun tindakan, (4) Kedua negara menjalankan objektif dari universal disarmament and nonproliferation, (5) Mengakui akan pentingnya saling menyetujui *confidence-building measures* untuk meningkatkan lingkungan yang aman, dan (6) Mengingat kembali persetujuan pada tanggal 23 September 1998 bahwa lingkungan damai dan keamanan merupakan kepentingan nasional yang utama dari kedua belah pihak dan resolusi dari semua isu terkemuka, termasuk Jammu dan Kashmir merupakan tujuan yang penting (Suryaji, 2016)

Ketentuan pada perjanjian ini merupakan kesepakatan bersama untuk pengembangan persenjataan atom dan untuk menghindari penggunaan operasional senjata nuklir yang tidak disengaja dan tidak sah. Deklarasi Lahore menambah tanggung jawab kepada kepemimpinan kedua negara untuk menghindari perlombaan nuklir, serta konflik non-konvensional maupun konvensional.

Deklarasi Lahore merupakan salah satu perjanjian penting setelah Shimla Agreement pada tahun 1972 dan Non-Nuclear Aggression Agreement pada tahun 1988. Setelah kedua Perdana Menteri menandatangani perjanjian tersebut, Menteri Luar Negeri Pakistan, Shamshad

Ahmad dan Menteri Luar Negeri India, Krishnan Raghunath menandatangani sebuah MoU pada tanggal 21 Februari 1999 dalam upaya mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan aman antara kedua negara. MoU tersebut menegaskan kembali komitmen berkelanjutan dari pemerintah masing-masing terhadap prinsip dan tujuan piagam PBB (Nuclear Threat Initiative, 2020).

Setelah disepakatinya Deklarasi Lahore oleh Pakistan dan India, hubungan antar keduanya mulai membaik dan menunjukkan perubahan yang positif. Kedua negara menaati isi dari perjanjian tersebut dan menerapkan sesuai isi yang telah disepakati sehingga peningkatan hubungan lebih baik terjadi di antara keduanya. Setelah disepakatinya Deklarasi Lahore, kedua negara tersebut juga melakukan upaya perdamaian dengan adanya beberapa perjanjian baru yang merujuk dan menguatkan Deklarasi Lahore.

c) *Credible Minimum Deterrence (CMD)*

Credible Minimum Deterrence (CMD) merupakan prinsip yang digunakan oleh India dalam minimum deterrence yang dapat dipercaya adalah prinsip yang menjadi dasar strategi nuklir India. Prinsip ini menggaris bawahi tidak ada penggunaan pertama (*no first use*) dengan kemampuan serangan kedua terjamin, dan di bawah minimal deterrence sebagai lawan dari kepastian akan kehancuran bersama. Nuklir tentatif India diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1999 oleh Sekretaris Dewan Penasehat Keamanan Nasional, Brajesh Mishra. Kemudian draf ini diadopsi dengan beberapa modifikasi ketika *Nuclear Command Authority* diumumkan pada tanggal 4 Januari 2003. Perubahan yang signifikan ada pada pelunakan prinsip *No First Use* untuk menambahkan pernyataan mengenai serangan nuklir sebagai balasan terhadap serangan senjata biologi dan kimia (Embassy of India, 1999).

“8. *Disarmament and Arms Control*

8.1. *Global, verifiable and non-discriminatory nuclear disarmament is a national security objective. India shall continue its efforts to achieve the goal of a nuclear weapon-free world at an early date.*

8.2. *Since no-first use of nuclear weapons is India's basic commitment, every effort shall be made to persuade other States possessing nuclear weapons to join an international treaty banning first use.*

8.3. *Having provided unqualified negative security assurances, India shall work for internationally binding unconditional negative security assurances by nuclear weapon states to non-nuclear weapon states.*

8.4. *Nuclear arms control measures shall be sought as part of national security policy to reduce potential threats and to protect our own capability and its effectiveness.*

8.5. *In view of the very high destructive potential of nuclear weapons, appropriate nuclear risk reduction and confidence building measures shall be sought, negotiated and instituted (Embassy of India, 1999).”*

Sesuai dengan isi *Draft Report of National Security Advisory Board on Indian Nuclear Doctrine* poin delapan mengenai *Disarmament and Arms Control* kebijakan CMD memperjelas kedudukan senjata nuklir yang dimiliki oleh India dan Pakistan yang merupakan alat pertahanan yang ditujukan kepada masing-masing negara. Kebijakan CMD India memprioritaskan kepada kemampuan retaliasi atau kemampuan *second-strike* yang mumpuni dan jelas mengancam keamanan Pakistan untuk tidak menggunakan kemampuan *first-strike* yang dimiliki. Pakistan membuat prasyarat yang membuat India tidak akan mengeskalasi konflik menuju perang nuklir terlepas dari kebijakan *No First Use* yang telah disetujui. Keseimbangan inilah yang membuat kedua negara cenderung menghindari risiko yang secara terbuka

ditunjukkan oleh masing-masing negara sehingga stabilitas nuklir di kawasan dapat terjaga.

Kebijakan dan perjanjian oleh Pakistan dan India mengenai senjata nuklir dibuat karena adanya kesadaran kedua negara akan kemampuan nuklir oleh masing-masing negara. Kedua negara berusaha untuk menekan terjadinya perang nuklir yang dapat merugikan dan menghancurkan kedua negara. Hal ini dapat menekan ataupun menjadi acuan bagi pemimpin kedua negara dalam mengambil tindakan mengenai konflik yang terjadi terlepas dari peningkatan kepemilikan senjata nuklir yang dimiliki.

4. Stabilitas Keamanan Pakistann dan India Pada Tahun 2017-2019

Kebijakan luar negeri disusun berdasarkan kepentingan nasional negara. Kepentingan nasional Pakistan adalah untuk mempertahankan stabilitas negara dari ancaman eksternal. Adanya pertimbangan keamanan regional Asia Selatan dan dominasi India, Pakistan memprioritaskan dua isu yang ditanamkan pada kebijakan luar negerinya. Pertama adalah mencukupkan pertahanan nasional yang ditujukan untuk menghadapi negara tetangga terutama India yang relatif lebih kuat dan yang kedua adalah prioritas untuk meningkatkan bargaining positions terhadap India mengenai permasalahan Kashmir (Syarifuddin, 2005). Kedua isu ini merupakan isu pertahanan yang memiliki potensi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Pakistan. Mengenai wilayah Kashmir, konflik militer dapat bertambah besar dikarenakan pengembangan senjata nuklir yang dimiliki India dan kapabilitas misil jarak jauh India yang dapat menjangkau ke wilayah Pakistan. Isu Kashmir dan program senjata nuklir India merupakan dua hal yang berhubungan satu sama lain, sehingga Pakistan membuat kebijakan luar negeri yang sedemikian rupa untuk menangani isu-isu ini.

Kebijakan luar negeri dapat

berubah berdasarkan kepentingan nasional dan kondisi internasional, hal inilah yang terjadi pada kebijakan luar negeri Pakistan. Pada tahun 1990an, kebijakan luar negeri Pakistan mengalami perubahan. Pada saat itu Pakistan merubah fokus negaranya untuk menjadi lebih terbuka terhadap dunia luar (Khan, 2009, p. 461). Menurut Khan (2007), Pakistan seharusnya menepatkan dirinya sebagai "frontline state" pada penolakan terhadap terror yang dipelopori oleh Amerika Serikat. Penawaran ini mendapatkan reaksi dari India. Lebih lanjutnya, Pakistan juga membentuk kerja sama dengan India yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan India di kawasan. Pakistan sadar akan letak geografis, ekonomi, pertahanan, dan kekuatan militer sehingga hubungan yang tidak stabil dengan India membuat Pakistan harus selalu dalam kondisi siap siaga. Untuk menanggulangi ini, Pakistan juga berkerja sama dengan negara-negara adi daya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Pada situasi seperti ini, dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kebijakan luar negeri Pakistan pada abad 21 adalah mencari rasa aman dengan cara kerjasama bilateral (Chaziza, 2016, pp. 1-15). Lebih lanjut, kebijakan luar negeri Pakistan memerlukan untuk diobservasi ulang berkenaan dengan pemerintah Pakistan yang bertindak offensive terhadap India dengan menembakkan dua pesawat tempur milik pasukan militer India yang memasuki wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan pada Februari 2019. Menurut Mayor Jenderal Asif Ghafoor, pasukan angkatan udara Pakistan menembak dua jet tempur yang berada di wilayahnya. Satu pesawat tempur jatuh di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan sedangkan yang lain hancur di wilayah India (Kompas, 2019). Juru bicara menteri luar negeri Pakistan Mohammad Faisal menyatakan bahwa tujuan dari tindakan ini adalah untuk menegaskan hak Pakistan sebagai keharusan dan kemampuan untuk melindungi diri. Mohammad Faisal

kemudian menambahkan bahwa Pemerintah Pakistan tidak ingin terjadinya peningkatan permusuhan antar kedua negara, namun Pakistan tetap bersiap untuk bertindak jika ada keadaan yang mengharuskan pemerintah Pakistan bertindak (Novia, 2019). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Pakistan terdapat nilai offensive dalam konteks keharusan untuk menjaga kedaulatan negara. Hal ini juga sama dengan pandangan Jervis (2008) mengenai security dilemma yang menyatakan bahwa lebih baik jika sebuah peperangan dapat dialihkan, jika hal itu tidak dapat terjadi maka solusi terbaiknya adalah perang (Impiani, 2019, p. 236).

India merupakan negara yang mendominasi di wilayah Asia Selatan. Hal ini dapat dilihat dari kekuatan yang dimiliki India dalam sistem pertahanan yang kuat, formasi militer yang kokoh, dan teknologi yang terus berkembang (Bhatnagar & Passi, 2016). Sebagai tambahan kekuatan yang dimiliki oleh India adalah dominasi India yang dikuatkan dengan soft power yang dapat ditinjau dari kebijakannya. Kebijakan luar negeri India di bawah pimpinan Narendra Modi bertujuan untuk mempertahankan stabilitas India sebagai hegemoni regional. Ide ini dituangkan pada kebijakan luar negeri "*Neighborhood First*". "*Neighborhood First*" merupakan kebijakan luar negeri India yang menekankan untuk mempertahankan hubungan dengan negara anggota SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*), negara tetangga di wilayah Asia Timur, dan bagian timur dari wilayah Asia Tenggara. Pakistan adalah salah satu negara anggota dari SAARC, namun walaupun dengan kebijakan ini bukan berarti Pakistan tidak mendapatkan perhatian dari kebijakan luar negeri India (Bhatnagar & Passi, 2016).

SAARC merupakan organisasi regional yang bertujuan untuk menyatukan negara-negara di wilayah Asia Selatan

yang selalu memiliki rasa curiga terhadap satu sama lainnya, terutama Pakistan dan India. Selain itu, secara geografi India merupakan negara yang memiliki wilayah terluas di Asia Selatan, India juga memiliki posisi yang strategis yang terletak ditengah kawasan Asia Selatan. Oleh karena itu meskipun kebijakan ini memiliki jangkauan yang luas, dengan menamakan kebijakan "*Neighborhood First*" menjadikan celah bagi India untuk mengunci Pakistan. India menganggap kerjasama ekonomi Pakistan dan Tiongkok yang dinamakan *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) pada tahun 2015 merupakan ancaman. Di Asia, India dan Tiongkok merupakan rekan yangimbang, kemudian konflik yang berkelanjutan antara Pakistan dan India, tentu saja kerjasama Pakistan dan Tiongkok dilihat sebagai ancaman.

Konflik besar yang sudah terjadi sejak lama terhadap Pakistan dan India membuat pemerintahan India merespon terhadap kerja sama Tiongkok-Pakistan dengan merubah orientasi dari kebijakan *Neighborhood First* menjadi lebih offensive terhadap kedua negara tersebut, terutama Pakistan. Penyebab utama perubahan orientasi ini disebabkan oleh pertahanan. Pada kasus ini, pertahanan India dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dikategorikan menjadi dua fokus, yaitu pertahanan dari ancaman terorisme yang mana merujuk pada penandatanganan MoU pada korporasi yang melawan terorisme dengan Amerika Serikat pada tahun 2015 dan konflik terhadap teritori Kashmir dengan Pakistan. Oleh karena itu, jika terjadi penyerangan provokasi atau tindakan Pakistan atau grup terorisme Pakistan, kebijakan *Neighborhood First* akan menjadi pembenaran akan penyerangan India terhadap Pakistan.

Pada kasus yang terjadi, Pakistan dan India menamakan serangan satu sama lain menggunakan angkatan udara pada tanggal 26 dan 27 Februari 2019 adalah bukti dari kebijakan luar negeri yang

offensive. Penyerangan tersebut diinisiasikan oleh angkatan udara India yang memasuki wilayah Kashmir Pakistan dan melakukan penembakan terhadap grup militan yang berlokasi di Pakistan yang disebut Jaish-e-Mohammed (JeM). India mengakui bahwa tindakan angkatan udaranya dipengaruhi serangan di Pakistan yang menargetkan tempat berlokasinya grup militan JeM. Sekretaris Luar Negeri India, Vijay Gokhale mengklaim telah berhasil menyerang banyak personel militan JeM termasuk anggota baru, komandan, dan grup yang dilatih untuk melakukan operasi bunuh diri. Operasi yang dilakukan oleh militer India ini disebabkan oleh bom bunuh diri oleh militan Pakistan, JeM yang telah membunuh 40 orang pasukan inti yang ada di distrik Pulwama, yaitu daerah yang Kashmir yang dikuasai oleh India pada tanggal 14 Februari 2019. Serangan grup ini terjadi ketika 78 orang India melakukan konvoi kendaraan dengan membawa 2.547 polisi keamanan yang kemudian diserang menggunakan bom bunuh diri oleh teroris. Penyerangan ini merupakan kejadian yang memakan paling banyak korban setelah penyerangan Mumbai pada tahun 2008. (Tjoa, 2019). Keadaan menjadi semakin rumit dikarenakan pemerintah India percaya bahwa pemerintah Pakistan merupakan dalang dalam kejadian ini, hal ini dijadikan dasar India untuk membalaskan dendam terhadap pasukan keamanan Pakistan.

5. Peningkatan Ketegangan di Wilayah LoC

Pada akhir tahun 2016 – 2018 terjadi beberapa pertempuran berskala kecil antara Pakistan dan India. Pertempuran kecil ini kebanyakan merupakan baku tembak antara militer kedua negara pada wilayah perbatasan de facto atau *Line of Control* (LoC), Kashmir. Pertempuran kecil ini dimulai setelah India melancarkan penyerangan militer pada markas militan di wilayah Azad Jammu dan Kashmir yang dikuasai Pakistan pada

tanggal 29 September 2016 (HT Correspondent, 2016).

Setelah penyerangan yang dilakukan oleh pihak India, Pakistan menolak laporan bahwa penyerangan tersebut ditargetkan pada militan, yang menandakan bahwa pasukan India melakukan baku tembak hanya kepada pasukan keamanan Pakistan di wilayah LoC tanpa melewati batas wilayah Pakistan yang menyebabkan dua orang militer Pakistan tewas dan sembilan orang terluka. Setelah kejadian ini Pakistan dan India beberapa kali mengalami konflik baku tembak di wilayah LoC, Kashmir yang melibatkan kedua militer maupun masyarakat sipil.

Pada tahun 2019 perbatasan Pakistan dan India mengalami lebih dari 50 kali peristiwa penembakan bersenjata di wilayah perbatasan de facto di Kashmir. Peningkatan ketegangan terjadi mulai tanggal 14 Februari 2019 pada peristiwa Pulwama di Jammu dan Kashmir yang menewaskan 40 anggota dari Indian Central Reserve Police Force. Dua belas hari setelah kejadian tersebut, pada pagi hari tanggal 26 Februari 2019 pihak India melakukan penyerangan udara di dekat Balakot, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak pertempuran pada wilayah perbatasan Kashmir, namun dengan skala yang jauh lebih kecil. Tercatat dari tahun 2016 hingga 2018 terjadi pertempuran kecil yang melibatkan pasukan militan di perbatasan. Pertempuran kecil ini tetap menewaskan korban jiwa dari kalangan militer, militan, dan warga sipil (Lambert, 2015). Pada awal tahun 2019 terjadi peristiwa bom bunuh diri terhadap pasukan militer India yang menewaskan 40 pasukan keamanan India. Bom bunuh diri ini dilakukan oleh salah satu kelompok militan yang berbasis di Pakistan, yaitu Jaish-e-Mohammad (JeM). Beberapa hari setelah kejadian ini India melancarkan penembakan dengan melewati LoC di Khyber Pakhtunkhwa, salah satu provinsi di Pakistan. India mengklaim penembakan

ini menewaskan sebagian besar anggota militan JeM (Lambert, 2015).

Militer Pakistan pertama kali mengumumkan penyerangan udara pada hari yang sama dan mengklaim bahwa pesawat tempur India telah melewati batas internasional dan menjatuhkan roket di area tidak berpenghuni di dekat Balakot di Khyber Pakhtunkhwa, India. Penyerangan tersebut diklaim menargetkan pada penampungan pelatihan teroris dan telah menewaskan banyak anggota teroris. Pada second airstrike, yaitu serangan balasan oleh Pakistan, dilakukan pada siang hari tanggal 27 Februari di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Pertempuran antar kedua negara ini menyebabkan jatuhnya MIG-21 Bison milik India oleh pasukan udara Pakistan.

Pakistan dan India beberapa kali mengalami naik turun ketegangan konflik terutama pada wilayah Kashmir. Pada awal kemerdekaan kedua negara ini beberapa kali mengalami konflik dan pertempuran yang cukup besar sehingga menewaskan banyak korban jiwa baik pasukan militer maupun warga sipil. Setelah konflik besar yang terjadi beberapa dekade setelah kemerdekaan, Pakistan dan India mulai menurunkan konflik terbuka antar negara. Salah satu faktor yang membuat kedua negara mempertimbangkan untuk melakukan penyerangan besar-besaran adalah dikarenakan persenjataan dan senjata nuklir yang semakin tahun semakin bertambah dan pada akhirnya membuat negara lawan harus benar-benar mempertimbangkan dampak yang akan terjadi jika melakukan penyerangan.

Para pemimpin kedua negara sadar akan bencana yang disebabkan oleh perang nuklir. Mubarakmand, seorang yang telah bekerja di Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) pada tahun 1962-2007 menyatakan observasinya bahwa kedua negara tidak akan bertindak lebih jauh dalam perang nuklir bahkan jika terjadi situasi peningkatan ketegangan antar keduanya. Provokasi konvensional akan tetap berlanjut hingga waktu yang

lama, namun ia memperhitungkan bahwa kedua negara tidak akan melewati batas dengan pada opsi perang nuklir.

6. Analisis

Pada kasus *arms race* antara Pakistan dan India, peneliti menggunakan teori neorealisme yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz (1979). Neorealisme memandang bahwa struktur anarki internasional merupakan hal yang mempengaruhi negara dalam bertindak agresif. Negara yang merupakan aktor dalam politik internasional menyadari kondisi anarki ini dan berusaha untuk memperkuat negaranya, baik dalam soft power maupun hard power. Dalam kasus konflik antara Pakistan dan India, kedua negara lebih cenderung untuk membangun hard power agar diakui oleh negara lawan dan sebagai alat pertahanan negara, namun dampak dari peningkatan hard power ini adalah kedua negara menjadi tetap dalam konflik berkepanjangan dikarenakan adanya security dilemma yang menyebabkan terjadinya *arms race* antar keduanya.

Waltz (1979) menyebutkan bahwa dalam politik internasional yang anarki, setiap aktor negara harus memperjuangkan sendiri eksistensinya dengan membangun kekuatan militer dan pertahanan yang kuat sehingga negara lain akan mempertimbangkan keinginan untuk menyerang dan mempertimbangkan kemungkinan kekalahan dalam perang. Dalam konflik Pakistan dan India, masing-masing negara sadar akan hal ini. Seperti yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan bahwa negaranya harus berhati-hati terhadap eskalasi konflik yang terjadi antar keduanya pada kejadian penembakan pilot India pada tahun 2019. Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj juga memiliki pandangan yang sama, bahwa kedua negara harus berusaha untuk

mengekang tindakan yang dapat memperparah konflik yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya perang. Pakistan dan India sama-sama menyadari akan dampak yang terjadi jika perang terjadi antar keduanya dan dapat menyebabkan korban jiwa bahkan hancurnya negara.

Konflik Pakistan dan India menyebabkan terjadinya usaha untuk balancing power dan akhirnya menyebabkan *arms race* antar keduanya. India memulai untuk menggunakan kekuatan nuklir sebagai alat pertahanan dan mulai percobaan nuklir pada tahun 1974. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi negara Pakistan yang kemudian mengikuti jejak India untuk memiliki senjata berkekuatan nuklir sebagai salah satu alat pertahanan. Kedua negara ini saling berlomba dalam uji coba nuklir dan menjadikan pertahanan sebagai sektor utama pengeluaran negara sehingga terjadi *arms race* antar keduanya. *Arms race* yang terjadi merupakan usaha masing-masing negara untuk memperkuat pertahanan negara sehingga negara lawan enggan untuk menyerang.

Arms race antara Pakistan dan India dapat dijelaskan dengan teori neorealisme dimana memfokuskan pada struktur sistem internasional dan konsekuensinya (Jackson and Sorensen 1999, 51). Pada istilah teknologi nuklir bagi kedua negara merupakan motivasi negara untuk mengembangkan senjata nuklir untuk mencapai status kekuatan nuklir dengan cara membeli persenjataan dari negara lain seperti Amerika Serikat, Russia, ataupun Tiongkok dan menyebabkan saling ketergantungan antar negara. Kenneth Waltz menyatakan pendekatan neorealisme dapat di aplikasikan pada *arms race* Pakistan dan India, yang pertama karena struktur anarki pada sistem internasional yang menyebabkan tidak adanya kekuasaan tinggi yang dapat memerintah negara lain.

Kedua, sistem internasional yang terbagi dari unit-unit yang saling berinteraksi antar negara dan menangguhkannya pada kekuatan relatif yang dimiliki, diidentifikasi sebagai kemampuan relatif. Menurut Waltz, menjaga otonomi dan kedaulatan adalah sifat suatu negara untuk bertahan dalam sistem internasional yang anarki dan menjelaskan bagaimana Pakistan dan India bertindak untuk meningkatkan dan memperbanyak peralatan senjata dan teknologi nuklir untuk kepentingan keamanan negara. Neorealisme juga mengakui adanya kerjasama antar negara seperti kerjasama India dengan Uni Soviet pada masa perang dingin dan Pakistan yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan, kekuasaan, mempertahankan otonomi dan meningkatkan posisi politik. Oleh karena itu, bagi banyak negara berkembang seperti Pakistan dan India, simbol industrialisasi ekonomi dan teknologi modern yang ada dalam istilah militer merupakan sumber status dan prestise yang penting dalam sistem global dan dianggap sebagai persaingan tanpa tujuan dalam jangka panjang.

Pada stabilitas keamanan, dampak dari *arms race* menyebabkan Pakistan dan India beberapa kali mengalami naik turun ketegangan sejak kedua negara tersebut berdiri. Hingga pada akhirnya terjadi pertempuran besar pada Indo-Pakistani War tahun 1965 dan perang Kargil tahun 1999. Pertempuran tetap terjadi antara Pakistan dan India terutama pada wilayah LoC namun dalam skala yang lebih kecil. Hal ini juga dikarenakan peran pemerintah yang menahan diri dalam mengambil tindakan dikarenakan masing-masing negara tau dan paham dengan kapabilitas senjata yang ada dikarenakan perjanjian untuk bertukar informasi senjata

yang telah disetujui oleh masing-masing negara.

D. Simpulan

1. Kesimpulan

1. Pakistan dan India memiliki sejarah panjang mengenai konflik antar keduanya bahkan sebelum diberikannya kemerdekaan oleh Bangsa Inggris. Kashmir yang menjadi wilayah perbatasan konflik dikarenakan diperebutkan oleh Pakistan dan India akhirnya terbagi menjadi dua wilayah yang dikuasai keduanya dan dibatasi oleh Line of Control. Konflik yang terjadi antara Pakistan dan India membuat kedua negara ini saling bersaing dalam memperkuat pertahanan negara, baik dalam bidang militer maupun dalam membuat dan membeli senjata nuklir.

2. Teori neorealisme dapat menjelaskan perilaku antara Pakistan dan India. Anggapan dasar neorealisme dalam sistem internasional yang anarki atau keadaan dimana tidak adanya kedudukan tertinggi di atas negara akan memicu tindakan negara yang berlomba-lomba untuk memperkuat posisi pertahanan negaranya pada dunia internasional. Pakistan dan India saling berlomba untuk menambah kekuatan negara, baik dalam pertahanan militer maupun senjata nuklir yang menyebabkan terjadinya *arms race* antar keduanya, hal ini dapat terjadi karena adanya rasa security dilemma pada kawasan. Tindakan ini dilakukan oleh kedua negara sebagai tindakan pertahanan atau pencegahan agar negara tidak diserang oleh negara lain, namun dampak lain dari peristiwa ini adalah terciptanya damai negatif.

3. *Balance of power* yang melibatkan Pakistan dan India terjadi karena letak geografis, dimana kedua negara ini saling berbatasan wilayah. Perbatasan wilayah Kashmir merupakan salah satu wilayah

konflik yang diperebutkan oleh kedua negara. Pakistan dan India saling berlomba untuk memperkuat negaranya agar tidak diserang dan hal ini membuat terjadinya situasi perimbangan kekuasaan antar keduanya. Kedua negara ini saling berusaha untuk menyeimbangi kekuatan terutama dalam pertahanan militer dan senjata nuklir. Hal ini dibuktikan dengan persaingan kepemilikan senjata nuklir yang oleh kedua negara dan banyaknya pengeluaran negara dalam bidang militer agar dapat menyetarakan kekuatan di kawasan, terutama dalam hard power.

4. Stabilitas negara Pakistan dan India beberapa kali mengalami naik turun ketegangan dan terjadinya pertempuran setelah kemerdekaan, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Pada awal kemerdekaan beberapa kali terjadi eskalasi konflik hingga berujung perang antara keduanya. Setelah beberapa perang terjadi, Pakistan dan India memulai untuk melakukan perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang melibatkan keduanya. Beberapa perjanjian damai antara keduanya berhasil diratifikasi oleh masing-masing negara sehingga dapat menekan konflik yang terjadi terutama dengan Non-Nuclear Aggression Agreement. Pada perjanjian ini masing-masing negara setuju untuk saling bertukar detail informasi dari masing-masing markas militer, pusat persenjataan, dan total senjata yang dimiliki. Hal ini membuat masing-masing negara akan mempertimbangkan untuk saling menyerang karena dampak yang akan diakibatkan dapat merugikan bahkan menghancurkan kedua negara. Negara yang sadar akan akibat ini pada akhirnya akan menahan diri jika terjadi eskalasi konflik dan memilih untuk berdamai.

2. Saran

1. Terkait *balance of power* yang

terjadi di antara Pakistan dan India, akan lebih baik jika kedua negara menggunakan cara balancing dengan soft power yaitu menjalin dan memperkuat kerjasama dengan negara lain yang dapat memperkuat posisi negara di politik internasional. Diplomasi dapat memberikan keuntungan bagi negara yang terlibat dan menambah aliansi dengan negara lain tanpa menimbulkan rasa tidak aman bagi warga negara.

2. Terkait *arms race* yang terjadi diantara Pakistan dan India, kedua negara harus dapat mengelola dan membatasi pengadaan senjata nuklir yang dapat memunculkan rasa tidak aman di kawasan dan rasa curiga satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang akhirnya dapat memicu eskalasi konflik antar keduanya. Pakistan dan India juga harus berpedoman pada kebijakan dan perjanjian yang telah dibuat dan mengimplementasikan sesuai apa yang telah disetujui bersama.

3. Terkait stabilitas, pemerintah Pakistan dan India harus dapat mengendalikan eskalasi konflik yang terjadi di perbatasan. Pemerintah dapat memberikan pernyataan mengenai konflik yang terjadi dan dengan solusi yang dapat menyelesaikan konflik dengan bersikap netral agar eskalasi konflik tidak terjadi di kalangan masyarakat luas.

Buku:

Barash, David P., and Charles P. Webel. 2016. *Peace and Conflict Studies*. Florida: SAGE Publications.

Creswell, John W. 2013. *Research Design*. SAGE.

Dugis, Visensio. 2018. *TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL*. Surabaya, Indonesia: Airlangga University Press.

Frey, Karsten. 2007. *India's Nuclear Bomb and National Security*. New York: Routledge.

Griffiths, Martin. 2007. *International Relations Theory for the Twenty-First Century*. Canada: Routledge.

Hadiwinata, Bob Sugeng. 2017. *Studi Dan Teori Hubungan Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jackson, Robert, and Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. England: Oxford University Press.

Mas'ud, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.

Paul, T. V., James J. Wirtz, and Michel Fortmann. 2004. *Balance of Power*. California: Stanford University Press.

Puri, Luv. 2013. *Across the Line of Control*. India: Columbia University Press.

Sagan, Scott Douglas, and Kenneth Neal Waltz. 2003. *The Spread of Nuclear Weapons*. London: W W Norton & Company Incorporated.

Sorensen, George, and Robert Jackson. 2009. *Pengantar Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Waltz, Kenneth Neal. 1979. *Theory of International Politics*. California: McGraw-Hill Humanities, Social Sciences & World Languages.

Dokumen resmi:

Embassy of India. 1999. "Draft Report of National Security Advisory Board on Indian Nuclear Doctrine."

United States Institute of Peace. 1999.
“The Lahore Declaration.”

Work of Governments of India dan
Pakistan. 2013. “India-Pakistan
Non-Attack Agreement.”

**Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi,
Laporan Penelitian:**

Bhatnagar, Aryaman, and Ritika Passi.
2016. “Neighborhood First:
Navigating Ties Under Modi.”

Chaziza, Mordechai. 2016. “China–
Pakistan Relationship: A Game-
Changer for the Middle East?”

Dhuipala, Venkat. 2015. “Creating a New
Medina: State Power, Islam, and
the Quest for Pakistan in Late
Colonial North India.”

Impiani. 2018. “Escalation of Military
Conflict Between India and
Pakistan in The Post Lahore
Declaration (1999-2019): Security
Dilemma Perspective.”

Khan, Shaheen Rafi. 2009. *Regional Trade
Integration and Conflict
Resolution*. Canada: IDRC.

Popovic, Milos. 2015. *The Perils of Weak
Organization: Explaining Loyalty
and Defection of Militant
Organizations Toward Pakistan*.
Paris: Taylor Francis.

Suryaji, Egi Frisma. 2016. “Pengaruh
Pengembangan Senjata Nuklir
India Dan Pakistan Terhadap
Penurunan Konflik Antara Kedua
Negara Tahun 2004-2015.”

Tyre, Samel E. 2003. “The India Pakistan
Conflict and the Nuclear
Nonproliferation Treaty.”

Website:

BBC News. 2000. “Analysis: The World’s
Most Dangerous Place?” BBC

News. March 23, 2000.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/687021.stm.

———. 2019a. “Pulwama Attack: India
Will ‘completely Isolate’
Pakistan.” BBC News. BBC News.
February 15, 2019.
<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47249133>.

———. 2019b. “Viewpoint: How Far
Might India Go to ‘punish’
Pakistan? .” BBC News. BBC
News. February 15, 2019.
<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47250994>.

BBC News Indonesia. 2012. “Rusia, India
Tingkatkan Kerja Sama Militer.”
BBC News Indonesia. December
24, 2012.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121224_rusia_india_militer.

———. 2017. “India Catat Rekor:
Luncurkan 105 Satelit Sekali
Peluncuran - BBC News
Indonesia.” BBC News Indonesia.
February 17, 2017.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38977639>.

———. 2018. “Bentrokan Sengit Di
Kashmir: Sedikitnya 20 Orang
Tewas Dan 70 Luka-Luka.” BBC
News Indonesia. April 2, 2018.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43616833>.

———. 2019. “Konflik Pakistan-India:
India Menuntut Pakistan Bebaskan
Pilot Yang Pesawatnya Ditembak
Jatuh .” BBC News Indonesia.
February 28, 2019.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47383136>.

Blakemore, Erin. 2019. “The Kashmir

- Conflict: How Did It Start?" Culture. National Geographic. March 2, 2019. <https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/03/kashmir-conflict-how-did-it-start/>.
- Encyclopedia Britannica. 1998. "Balance of Power." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica. July 20, 1998. <https://www.britannica.com/topic/balance-of-power>.
- . 2013. "Arms Race." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica. December 16, 2013. <https://www.britannica.com/topic/arms-race>.
- Global Fire Power. 2020a. "Global Fire Power: Strength in Number." Military Strength. 2020. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=pakistan.
- . 2020b. "2020 Military Strength Ranking." Global Fire Power. July 13, 2020. <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>.
- India Government. 2020. "Defence | National Portal of India." National Portal of India. September 17, 2020. <https://www.india.gov.in/topics/defence>.
- Jejak Tapak. 2016. "Bagaimana India Bisa Memiliki Senjata Nuklir?" JejakTapak. <https://www.facebook.com/jejaktap>.
- akdotcom. August 27, 2016. <https://www.jejaktapak.com/2016/08/27/bagaimana-india-bisa-memiliki-senjata-nuklir/>.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. "Kedutaan Besar Republik Indonesia, DI ISLAMABAD, Pakistan." Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. <https://kemlu.go.id/islamabad/id/read/pakistan/314/etc-menu>.
- Novia, Dyah Ratna Meta. 2019. "India Menyerang, Pakistan Membalas." JawaPos.Com. PT. JawaPos Group Multimedia - JawaPos.com. February 28, 2019. <https://www.jawapos.com/internasional/28/02/2019/india-menyerang-pakistan-membalas/>.
- Rahmat Ali, Chaudhary. 1933. "Now or Never, by Chaudhary Rahmat Ali, 1933." Columbia University in the City of New York. January 28, 1933. http://www.columbia.edu/itc/mealc/pritchett/00islamlinks/txt_rahmat_ali_1933.html.
- Times of India. 2019. "Pulwama Terror Attack Today: 40 CRPF Jawans Martyred in IED Blast in Jammu and Kashmir's Pulwama ." The Times of India. Times of India. February 14, 2019. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/37-crpf-jawans-martyred-in-ied-blast-in-jks-pulwama/articleshow/67992189.cms>.